

**STRATEGI PENGADAAN KOLEKSI DEPOSIT KCKR SEBAGAI
PENGHIMPUNAN TERBITAN LOKAL DI DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Keisha Morilia Sammer¹, Marlini², Elva Rahmah³

^{1,2,3}Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Universitas Negeri Padang

Email: keishasammer20@gmail.com

Abstrak

Perpustakaan daerah berperan strategis dalam merekam dinamika sosial, budaya, dan intelektual masyarakat melalui penghimpunan terbitan lokal. Pengadaan koleksi deposit Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, namun pelaksanaannya di tingkat provinsi, khususnya di Sumatera Barat, masih menghadapi kendala berupa rendahnya kepatuhan wajib serah, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya sanksi administratif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi pengadaan koleksi deposit KCKR di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan strategi pengadaan meliputi pendataan penerbit, hunting KCKR, penyerahan mandiri, sosialisasi, serta pendekatan persuasif dan edukatif yang diperkuat melalui kerja sama lintas lembaga dan pengembangan sistem e-Deposit.

Kata Kunci: Pengadaan koleksi deposit, KCKR, Terbitan lokal

Abstrack

This study examines strategies for procuring deposit collections of Printed and Recorded Works (KCKR) in West Sumatra, mandated under Law No. 13 of 2018, amid challenges of low compliance, limited human resources, and weak administrative sanctions. A descriptive qualitative method was employed to analyze practices at the Provincial Archives and Library Office of West Sumatra. Strategies include publisher registration, active collection, voluntary submission, socialization, and persuasive educational approaches, reinforced through inter-institutional collaboration and the development of an e-Deposit system. Results highlight adaptive measures and institutional innovations needed to strengthen provincial deposit practices.

Keywords: Deposit collection acquisition, KCKR, Local publications

PENDAHULUAN

Perpustakaan merupakan lembaga yang memiliki peran strategis sebagai pusat informasi, pendidikan, penelitian, serta pelestarian budaya melalui pengelolaan berbagai bentuk koleksi, baik karya tulis, karya cetak, maupun karya rekam dalam berbagai bentuk dan media. Keberadaan perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat yang berperan dalam

meningkatkan literasi, memperluas akses terhadap pengetahuan, serta menjaga kesinambungan warisan intelektual dan kultural masyarakat (Kusnandar et al., 2025). Dalam konteks tersebut, perpustakaan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh, memanfaatkan, dan mengembangkan pengetahuan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Secara yuridis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menegaskan bahwa perpustakaan memiliki tugas untuk menghimpun, mengolah, melestarikan, dan melayani koleksi yang bernilai bagi kepentingan pendidikan, penelitian, dan pelestarian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan koleksi bukan sekadar kegiatan teknis, melainkan bagian dari tanggung jawab institusional perpustakaan dalam menjaga keberlanjutan sumber informasi yang dapat dimanfaatkan oleh publik. Dalam hal ini perpustakaan memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan serta kebudayaan secara berkelanjutan, terutama melalui penyediaan koleksi yang relevan, representatif, dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka (Azis et al., 2024).

Dalam konteks pemerintahan daerah, perpustakaan daerah memiliki peran yang semakin strategis karena tidak hanya menjalankan fungsi sebagai layanan informasi dan pendidikan bagi masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab dalam menghimpun dan melestarikan kekayaan intelektual daerah. Perpustakaan daerah berfungsi sebagai pusat dokumentasi dan referensi yang merekam dinamika sosial, budaya, dan intelektual masyarakat setempat melalui koleksi terbitan lokal yang dikelola secara berkelanjutan (Kurniati, 2023). Melalui koleksi tersebut, berbagai bentuk pengetahuan lokal dapat terdokumentasikan dengan baik serta dapat diakses oleh generasi mendatang. Terbitan lokal mencakup berbagai bentuk karya, seperti buku, terbitan berseri, karya rekam yang memuat nilai-nilai sejarah, seni, bahasa, adat istiadat, dan pengetahuan lokal yang berkembang di suatu wilayah. Selain berfungsi sebagai sumber informasi, keberadaan terbitan lokal di perpustakaan daerah juga menjadi rekaman identitas dan karakteristik masyarakat setempat. Penghimpunan terbitan lokal menjadi cara agar kekayaan intelektual daerah tidak hilang seiring perkembangan zaman, sekaligus menyediakan informasi autentik yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti, akademisi, pelajar, dan masyarakat umum sesuai dengan kebutuhan mereka (Ratnaningrum & Prasetyawan, 2018).

Upaya penghimpunan terbitan lokal di perpustakaan daerah tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan pengadaan koleksi deposit, khususnya Karya Cetak dan Karya Rekam atau yang disingkat menjadi KCKR. Koleksi deposit berperan sebagai instrumen penting untuk

menjamin bahwa setiap karya yang diterbitkan di suatu wilayah dapat terdokumentasi dan tersimpan secara sistematis sebagai bagian dari memori kolektif daerah. Melalui pengadaan koleksi deposit, perpustakaan daerah menjadi lembaga yang merekam perkembangan sosial, budaya, dan intelektual masyarakat setempat secara berkelanjutan. Pengadaan koleksi deposit menjadi landasan bagi keberlangsungan terbitan penerbit lokal agar tetap terjaga, dapat ditelusuri, dan dimanfaatkan kembali sesuai kebutuhan masyarakat. Tanpa pengelolaan deposit yang terencana, berbagai terbitan lokal berpotensi tidak terhimpun secara optimal, sehingga nilai informasi dan historis yang dikandungnya sulit diakses dan rentan hilang seiring berjalannya waktu (Hasan et al., 2019).

Pelestarian karya intelektual bangsa merupakan wujud perlindungan terhadap aset budaya yang mencerminkan perjalanan peradaban suatu bangsa. Di Indonesia, mandat tersebut diwujudkan melalui kebijakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SS-KCKR) yang bertujuan menghimpun seluruh terbitan sebagai bagian dari khazanah nasional. Melalui kebijakan ini, setiap karya yang dihasilkan tidak hanya dipandang sebagai produk penerbitan semata, tetapi juga sebagai bukti perkembangan pemikiran dan kreativitas masyarakat pada masanya. Keberadaan perpustakaan yang menghimpun koleksi deposit di tingkat nasional maupun provinsi merupakan institusi strategis yang bertanggung jawab mendokumentasikan, merawat, dan mewariskan hasil olah pikir serta kreativitas masyarakat kepada generasi berikutnya sekaligus mencegah hilangnya karya bernilai akibat perubahan zaman (Ratnaningrum & Prasetyawan, 2018).

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola penerbitan, pengaturan mengenai serah simpan KCKR diperbarui melalui Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Regulasi ini menegaskan kewajiban serah bagi penerbit dan produsen karya rekam serta kewajiban simpan bagi Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi sebagai lembaga penerima serah simpan (Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, 2018). Melalui ketentuan tersebut, negara menempatkan proses penghimpunan karya cetak dan karya rekam sebagai bagian penting dari upaya perlindungan dan pelestarian hasil budaya bangsa. Dengan adanya dukungan regulasi dan mekanisme yang jelas, perpustakaan daerah memiliki dasar kuat untuk menjalankan strategi pengadaan secara terencana dan berkelanjutan, sehingga koleksi deposit KCKR dapat dioptimalkan sebagai sarana utama dalam penghimpunan dan pelestarian terbitan lokal.

Layanan Deposit KCKR di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat memegang peran strategis sebagai pusat penghimpunan terbitan penerbit lokal yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjamin ketersediaan salinan karya lokal serta mendukung penelusuran informasi bagi peneliti dan masyarakat. Pengadaan koleksi deposit KCKR dilaksanakan melalui kombinasi mekanisme wajib serah simpan sesuai ketentuan perundang-undangan, akuisisi aktif melalui kerja sama dengan penerbit dan pencipta karya lokal, serta pengumpulan lapangan. Meskipun landasan hukum dan praktik deposit Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) terus berkembang, pelaksanaannya di Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar. Permasalahan utama terletak pada rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran pihak wajib serah, terutama instansi pemerintah dan perguruan tinggi. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan belum optimalnya penerapan sanksi administratif, sehingga masih banyak penerbit atau produsen karya rekam yang tidak menyerahkan karyanya tanpa adanya tindak lanjut yang tegas dari pihak wajib simpan. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas internal perpustakaan daerah, baik dari aspek sumber daya manusia pada bidang deposit maupun dukungan sarana pendukung, turut memengaruhi efektivitas pengadaan koleksi. Tantangan semakin kompleks seiring peralihan penerbitan ke format digital yang menuntut kesiapan infrastruktur e-deposit yang terintegrasi. Tanpa strategi pengadaan yang sistematis dan adaptif, yang mengintegrasikan kebijakan, teknologi, serta penguatan relasi dengan penerbit lokal, terbitan lokal berisiko tidak terhimpun secara utuh dan berpotensi mengalami kehilangan informasi secara permanen.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai strategi pengadaan koleksi deposit KCKR sebagai penghimpunan terbitan lokal di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini menelaah secara mendalam bagaimana strategi pengadaan dirancang dan diimplementasikan dalam praktik layanan deposit, termasuk berbagai langkah yang dilakukan untuk mengoptimalkan penghimpunan terbitan lokal. Sejumlah penelitian terdahulu dan praktik di berbagai daerah menunjukkan bahwa penghimpunan koleksi deposit akan sulit optimal jika hanya mengandalkan pola pengadaan pasif. Penelitian oleh Dalimunthe, Siregar, dan Fathurrahman (2024) menunjukkan bahwa strategi pengembangan koleksi lokal di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Labuhanbatu harus didukung oleh kebijakan pengelolaan yang terstruktur dan visi-misi yang kuat agar dapat mengatasi hambatan seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam memenuhi kebutuhan koleksi lokal masyarakatnya

(Dalimunthe et al., 2020). Selaras dengan itu, penelitian oleh Harahap dkk (2025) menemukan bahwa pengadaan koleksi deposit di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Deli Serdang belum sepenuhnya optimal karena belum adanya kebijakan khusus, ruang penyimpanan yang layak, dan pemahaman yang kuat dari pustakawan, sehingga strategi pengadaan koleksi deposit perlu dirancang lebih sistematis untuk meningkatkan pemanfaatannya oleh pemustaka (Harahap et al., 2024). Penelitian oleh Sentiana dkk (2025) menegaskan bahwa strategi pengembangan koleksi yang efektif harus mencakup analisis kebutuhan pengguna, kebijakan seleksi, prosedur pengadaan yang jelas, dan suatu kerangka yang relevan untuk memastikan koleksi deposit yang dihimpun benar-benar memenuhi kebutuhan informasi lokal (Sentiana et al., 2025).

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pengadaan koleksi deposit KCKR yang lebih efektif, inovatif, dan adaptif dalam penghimpunan terbitan penerbit lokal di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini mengembangkan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya dengan melakukan penelitian khusus terhadap konteks lokal Sumatera Barat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam strategi pengadaan koleksi deposit KCKR, tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi juga sebagai referensi bagi pengadaan dan pengelolaan koleksi deposit di provinsi lain di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat peran perpustakaan sebagai agen pelestarian budaya, pusat rujukan, dan inovasi dalam pengelolaan pengetahuan lokal di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi pengadaan koleksi deposit Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) sebagai penghimpunan terbitan lokal di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik fenomena yang ingin diteliti, yaitu strategi, kendala, dan upaya pengadaan koleksi deposit KCKR. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna. Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan

antara fenomena yang diteliti (Alfatih, 2017).

Penelitian dilaksanakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, khususnya pada bidang deposit KCKR. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis dan akademik. Pertama, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama dalam pelaksanaan serah simpan KCKR sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2018. Kedua, bidang deposit KCKR di lokasi ini menjadi pusat penghimpunan, pengelolaan, dan pelestarian terbitan lokal Sumatera Barat, sehingga menjadi representasi yang paling relevan untuk mengkaji strategi pengadaan koleksi deposit dan dinamika penghimpunan terbitan lokal. Ketiga, lokasi ini memiliki akses terhadap sumber dan data yang diperlukan serta memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara dan observasi. Pemilihan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sebagai lokasi penelitian sangat tepat untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai strategi, kendala, dan upaya penghimpunan terbitan lokal melalui pengadaan koleksi deposit KCKR.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan secara sistematis untuk memperoleh informasi yang mendalam dan valid mengenai strategi pengadaan koleksi deposit KCKR. Data primer diperoleh melalui tiga teknik utama. Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan dua orang pustakawan yang bertugas di bidang pengolahan deposit KCKR. Kedua, observasi langsung terhadap proses pengadaan koleksi yang dilakukan dengan mengamati aktivitas di bidang deposit, mulai dari penerimaan, pencatatan, pengolahan, hingga pelestarian koleksi KCKR. Ketiga, penelusuran media sosial yang mendokumentasikan kegiatan pengadaan koleksi KCKR, khususnya pada unggahan di Instagram yang dikelola oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Data sekunder diperoleh melalui beberapa sumber yang kredibel dan relevan. Pertama, dokumen internal perpustakaan berupa daftar inventaris koleksi deposit KCKR dan daftar penerbit lokal Sumatera Barat. Kedua, Undang-Undang No. 13 Tahun 2018 tentang SS-KCKR. Ketiga, artikel penelitian terdahulu yang membahas pengelolaan koleksi, strategi serah simpan, dan praktik penghimpunan terbitan lokal di berbagai perpustakaan daerah di Indonesia. Artikel-artikel ini digunakan sebagai pembandingan dan referensi teoritis untuk memperkaya analisis dan interpretasi data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara triangulasi, yaitu penggabungan beberapa metode untuk memperoleh data yang valid, meliputi: (1) wawancara langsung dengan dua pustakawan bidang deposit KCKR menggunakan pedoman wawancara

semi-terstruktur yang dirancang untuk menggali strategi pengadaan koleksi KCKR; (2) observasi langsung terhadap praktik pengadaan koleksi di lokasi penelitian serta penelaahan konten media sosial; (3) dokumentasi berupa pengambilan dan telaah dokumen tertulis yang berkaitan dengan proses dan kebijakan pengadaan koleksi. Penggunaan teknik triangulasi dalam pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang lebih kaya, mendalam, dan valid (Abrar, 2024).

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif analitik dengan model Miles & Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: (1) reduksi data adalah proses pemilihan dan penyederhanaan data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mengidentifikasi data yang relevan dengan fokus penelitian dan mengelompokkan data berdasarkan tema utama serta membuang data yang tidak terkait langsung dengan tujuan penelitian; (2) penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi dalam bentuk narasi deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai strategi pengadaan koleksi deposit KCKR; (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan menafsirkan makna dari data yang telah disajikan, mengidentifikasi pola dan hubungan antar kategori, serta menarik kesimpulan yang didukung oleh data dan teori yang relevan (Miles et al., 2019). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni pengecekan dan perbandingan data dari wawancara, observasi, dan dokumen, serta *member check*, yaitu konfirmasi hasil analisis dan interpretasi data kepada informan untuk memastikan bahwa temuan penelitian sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan mereka. Metode penelitian ini dirancang untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif dan valid mengenai strategi pengadaan koleksi deposit KCKR di Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadaan Koleksi

Pengadaan koleksi merupakan proses sistematis yang dilakukan perpustakaan untuk memperoleh bahan pustaka sesuai kebutuhan pemustaka dan tujuan institusi. Evans dan Saponaro (2015) mendefinisikan pengadaan koleksi sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi identifikasi kebutuhan, seleksi, hingga perolehan koleksi melalui berbagai metode, seperti pembelian, hibah, tukar-menukar, penerbitan sendiri, atau titipan pihak lain. Proses ini diawali dengan analisis kebutuhan koleksi yang mempertimbangkan karakteristik pemustaka dan arah pengembangan institusi serta diakhiri dengan keputusan pengadaan yang

memperhatikan relevansi, kemutakhiran informasi, dan ketersediaan anggaran. Pengadaan koleksi tidak semata-mata berorientasi pada penambahan jumlah, tetapi juga pada kualitas dan keberagaman koleksi agar perpustakaan mampu menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pelestarian secara optimal (Amalia, 2025).

Pengadaan koleksi deposit merupakan bagian khusus dari pengadaan koleksi yang berfokus pada penghimpunan karya cetak dan karya rekam (KCKR) sebagai bagian dari koleksi nasional. Setiap penerbit dan produsen KCKR yang berada di wilayah Indonesia memiliki kewajiban untuk menyerahkan eksemplar karya cetak dan/atau karya rekam kepada perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi sebagai lembaga penerima serah simpan. Penyerahan tersebut paling lambat tiga bulan setelah karya diterbitkan atau dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Winanda & Ardoni, 2025). Dalam praktiknya, pengadaan koleksi deposit KCKR sebagian besar dilakukan melalui penyerahan langsung oleh penerbit lokal ke perpustakaan, baik secara mandiri maupun melalui koordinasi dengan pihak perpustakaan. Selain mekanisme penyerahan langsung, pengadaan koleksi deposit juga diperkuat melalui kegiatan *hunting* KCKR oleh bidang deposit, yaitu penelusuran aktif ke penerbit, penulis, komunitas, atau lembaga terkait untuk memperoleh terbitan yang belum terserahkan secara formal, sehingga koleksi dapat terhimpun secara lebih lengkap dan representatif.

Koleksi Deposit KCKR

Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) merupakan seluruh hasil karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan oleh penerbit perseorangan, badan usaha, maupun badan hukum di suatu wilayah daerah yang kemudian dikelola oleh perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi sebagai lembaga penyelenggara deposit (Fahriyah, 2020). Dasar hukum serah simpan KCKR adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. UU ini mewajibkan setiap penerbit dan produsen karya rekam untuk menyerahkan eksemplar dari setiap judul karya yang diterbitkan kepada perpustakaan nasional dan perpustakaan provinsi sesuai domisili.
2. PP No. 55 Tahun 2021. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan penyerahan KCKR, pengelolaan hasil serah simpan, peran serta masyarakat, pemberian penghargaan, dan tata cara pengenaan sanksi administratif.
3. Peraturan Perpustakaan Nasional No. 8 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur standar pengelolaan koleksi serah simpan KCKR sebagai acuan bagi perpustakaan nasional dan

perpustakaan provinsi.

4. Terbitan Lokal. Terbitan lokal adalah karya tulis, karya cetak, atau karya rekam yang dihasilkan, diterbitkan, atau dipublikasikan oleh individu, kelompok, atau institusi dalam lingkup geografis tertentu serta memuat karakteristik, informasi, dan nilai yang khas dari daerah tersebut (Saputra et al., 2023). Terbitan lokal merepresentasikan identitas, pengetahuan, dan dinamika sosial budaya masyarakat setempat sehingga memiliki nilai penting sebagai sumber informasi bagi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelestarian pengetahuan lokal.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan informasi, pelestarian budaya lokal, dan pengembangan literasi masyarakat di wilayah Sumatera Barat. Peran strategis perpustakaan ini tidak hanya terbatas pada pengelolaan koleksi buku dan dokumen, tetapi juga sebagai pusat pelestarian budaya Minangkabau Sumatera Barat. Perpustakaan menjadi rujukan utama bagi peneliti, akademisi, dan masyarakat yang membutuhkan informasi tentang sejarah, budaya, dan perkembangan intelektual daerah. Salah satu fungsi strategis yang dijalankan oleh perpustakaan adalah pengelolaan koleksi deposit Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) sebagai upaya penghimpunan, pelestarian, dan pendayagunaan terbitan lokal yang dihasilkan oleh penerbit maupun perorangan di wilayah Sumatera Barat (Saputra et al., 2023). Layanan deposit KCKR di perpustakaan provinsi berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjamin terselamatkannya karya intelektual daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Dalam hal ini, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat berperan sebagai lembaga deposit daerah yang berwenang menghimpun terbitan lokal berdasarkan wilayah administrasinya.

Pengelolaan dan pengadaan koleksi deposit KCKR diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam serta Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 9 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dalam hal ini setiap penerbit wajib menyerahkan 2 (dua) eksemplar dari setiap judul karya cetak kepada perpustakaan nasional dan 1 (satu) eksemplar kepada perpustakaan provinsi tempat domisili penerbit yang dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan. Setiap produsen karya rekam yang memublikasikan karya rekam wajib menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul karya rekam kepada perpustakaan nasional dan 1 (satu) salinan kepada perpustakaan provinsi tempat domisili produsen karya rekam paling lama 1

(satu) tahun setelah dipublikasikan. Berdasarkan regulasi tersebut, tugas pokok Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Sumatera Barat, khususnya pada bidang deposit KCKR, bertanggung jawab dalam menghimpun, mengolah, menyimpan, dan melestarikan karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi deposit daerah.

Dalam pengelolaan koleksi deposit, perpustakaan menerapkan sistem pengkodean koleksi berdasarkan fungsi dan asal terbitan. CB (Cetak Buku) merupakan kode yang digunakan untuk mendata seluruh hasil cetakan penerbit yang berasal dari Sumatera Barat berdasarkan asal penerbit tanpa membedakan isi atau muatan informasi terbitan. Kode ini juga berfungsi sebagai alat pendataan jumlah terbitan penerbit lokal yang sudah terhimpun di perpustakaan. D3 merupakan kode khusus bagi koleksi deposit KCKR yang dihimpun oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sesuai kewenangannya sebagai perpustakaan provinsi. Berdasarkan data inventaris tahun 2025, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat mencatat data koleksi KCKR sebanyak 6.742 eksemplar untuk karya cetak dan 775 salinan untuk karya rekam. Koleksi buku tersebut menunjukkan tingkat keragaman dan dinamika penerbitan lokal di Sumatera Barat yang terlibat dalam serah simpan koleksi deposit menandakan adanya partisipasi aktif, meskipun data lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan penerbit masih perlu ditingkatkan. Untuk karya rekam menunjukkan upaya pelestarian dokumen audio-visual yang mendokumentasikan perkembangan seni, budaya, dan sejarah Sumatera Barat, meskipun pelaksanaan serah simpan karya rekam masih menghadapi kendala, terutama terkait rendahnya kepatuhan produsen karya rekam dalam menunaikan kewajiban serah tersebut.

Strategi Pengadaan Koleksi Deposit KCKR

Mekanisme serah simpan

Pengadaan koleksi deposit KCKR dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu kegiatan *hunting* KCKR dan penyerahan langsung oleh penerbit atau pencipta karya ke perpustakaan. *Hunting* KCKR adalah kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan bidang deposit dengan cara mendatangi langsung penerbit, instansi, atau pencipta karya untuk menghimpun terbitan lokal yang menjadi kewajiban serah simpan. Dalam praktiknya, *hunting* KCKR tidak hanya berfokus pada pengumpulan koleksi, tetapi disertai dengan sosialisasi kewajiban serah simpan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018. Kegiatan ini biasanya dilakukan ketika penerbit belum menyerahkan terbitannya secara mandiri atau belum memahami ketentuan deposit, sehingga pustakawan berperan aktif menjembatani kebijakan dengan pelaksana di lapangan. Prosedur ini diawali dengan

menghubungi penerbit atau instansi secara lisan atau tertulis untuk pemberitahuan kunjungan, dilanjutkan dengan kunjungan sesuai jadwal yang disepakati, penyampaian sosialisasi ketentuan UU KCKR, serta penerimaan koleksi yang menjadi kewajiban bagi penerbit. Pada tahap akhir, tim *hunting* akan memberikan tanda terima kepada penerbit sebagai bukti penyerahan koleksi deposit.

Pengadaan koleksi melalui mekanisme penyerahan langsung oleh penerbit ke perpustakaan adalah cara penghimpunan KCKR yang dilakukan ketika penerbit atau pencipta karya secara mandiri datang dan menyerahkan terbitannya ke perpustakaan tanpa melalui kegiatan *hunting* oleh pustakawan. Dalam mekanisme ini, penerbit menyerahkan karya cetak atau karya rekam yang telah diterbitkan kepada perpustakaan sesuai dengan kewajiban serah simpan. Setelah koleksi diterima, perpustakaan memberikan tanda terima resmi yang memuat judul koleksi, jumlah eksemplar, dan tanda tangan petugas sebagai bukti penyerahan. Sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan penerbit, perpustakaan memberikan sertifikat sebagai bentuk apresiasi atas pelaksanaan kewajiban serah simpan. Mekanisme penyerahan langsung ini menunjukkan adanya kesadaran dan kepatuhan penerbit terhadap kewajiban serah simpan.

Sosialisasi dan Edukasi mengenai Kebijakan Serah Simpan

Sosialisasi kebijakan serah simpan sebagai upaya penghimpunan terbitan lokal merupakan langkah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan penerbit atau pencipta karya terhadap kewajiban serah simpan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat secara rutin mengadakan kegiatan sosialisasi dan diskusi yang melibatkan penerbit, pustakawan, serta dinas terkait. Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan dalam forum resmi, tetapi juga secara langsung ketika pustakawan bidang deposit melaksanakan kegiatan *hunting* KCKR ke penerbit. Melalui pendekatan tersebut, pustakawan dapat menyampaikan informasi kebijakan serah simpan sekaligus menjelaskan prosedur teknis penyerahan karya cetak dan karya rekam secara langsung kepada pihak penerbit.

Selain sosialisasi lapangan, upaya peningkatan kesadaran penerbit juga diperkuat melalui kegiatan penganugerahan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dengan menggelar sosialisasi serah simpan KCKR untuk meningkatkan kepatuhan penerbit lokal sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Perpustakaan Nasional RI dan praktisi KCKR di Sumatera Barat, dengan materi yang disampaikan oleh Jumaidi, S.Pd., M.Pd. mengenai kebijakan serah simpan KCKR di Provinsi Sumatera Barat, Dian Dewi Kartika, S.Sos., M.Si. tentang pengelolaan dan pemanfaatan KCKR di perpustakaan provinsi, serta Indra Astuti,

S.S., M.Pd. yang membahas langkah strategis kebijakan kolaboratif antara Perpustakaan Nasional RI, perpustakaan daerah, dan penerbit. Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi atas berbagai permasalahan penerapan UU KCKR, mulai dari tingkat kepatuhan penerbit, mekanisme pelaporan, hingga pemahaman teknis serah simpan. Pada kesempatan tersebut, perpustakaan provinsi juga menyerahkan anugerah penerbit teraktif kepada sepuluh penerbit yang secara konsisten menyerahkan karya mereka. Apresiasi ini diharapkan dapat mendorong penerbit lain untuk terus mendukung upaya pelestarian karya cetak dan karya rekam sebagai bagian dari warisan pengetahuan daerah.

Pendekatan Pustakawan dan Monitoring Kepatuhan

Pendekatan yang dilakukan pustakawan dalam pengadaan koleksi deposit KCKR cenderung bersifat persuasif dan edukatif. Pada saat kegiatan *hunting* KCKR, pustakawan tidak hanya berfokus pada pengambilan koleksi, tetapi juga memberikan penjelasan secara langsung kepada penerbit atau pencipta karya mengenai kewajiban serah simpan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendekatan ini sekaligus menjadi sarana membangun kesadaran dan hubungan yang berkelanjutan. Strategi tersebut didukung dengan kegiatan pendataan penerbit yang hingga saat ini telah mencakup penerbit dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat, dengan jumlah terbanyak berada di Kota Padang sebanyak 40 penerbit, diikuti Kota Payakumbuh dan Kota Solok masing-masing sebanyak 4 penerbit, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Solok masing-masing 3 penerbit, serta wilayah lain dengan jumlah yang masih terbatas, bahkan beberapa daerah belum terdata memiliki penerbit lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendataan penerbit di Sumatera Barat masih perlu diperluas dan diperbarui secara berkelanjutan.

Selain melalui *hunting*, penguatan hubungan antara perpustakaan dan penerbit juga dilakukan melalui kegiatan penganugerahan kepada penerbit yang patuh melaksanakan kewajiban serah simpan. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga memperkuat koordinasi antara perpustakaan provinsi, perpustakaan nasional, dan penerbit lokal, sehingga memudahkan proses pendataan dan pemantauan kepatuhan penerbit. Kedepannya, strategi tersebut akan diperkuat dengan penerapan aplikasi e-Deposit yang memungkinkan proses penyerahan, pencatatan, dan pemantauan terbitan dilakukan secara digital. Melalui sistem ini, terbitan cetak dan digital akan tercatat secara terintegrasi, di mana terbitan digital yang diserahkan ke perpustakaan nasional dapat diakses oleh perpustakaan provinsi, sedangkan terbitan cetak tetap diserahkan sesuai ketentuan. Implementasi e-Deposit telah disosialisasikan melalui pertemuan daring yang melibatkan perpustakaan nasional,

perpustakaan daerah, dan penerbit, yang membahas diseminasi Undang-Undang Serah Simpan KCKR, pengenalan aplikasi e-Deposit SAKEDAP, serta pemberian anugerah KCKR sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem penerbitan dan pelestarian warisan dokumenter di Indonesia.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi pengadaan koleksi deposit KCKR di atas sejalan dengan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan deposit yang menekankan kolaborasi antara perpustakaan dan penerbit (Sentiana et al., 2025). Hasil ini menguatkan pandangan yang menyatakan bahwa sosialisasi dan apresiasi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan serah simpan.

Kendala dalam Pengadaan Terbitan Lokal

Kendala dalam penghimpunan terbitan lokal melalui koleksi deposit KCKR pada dasarnya tidak disebabkan oleh penolakan dari penerbit atau pencipta karya, melainkan lebih pada rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran sebagian instansi terhadap kewajiban serah simpan. Kondisi ini terutama ditemukan pada instansi dibawah naungan pemerintah dan perguruan tinggi yang mengalami pergantian sumber daya manusia, sehingga informasi mengenai ketentuan serah simpan KCKR tidak tersampaikan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut juga berkaitan erat dengan belum optimalnya penerapan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Dalam praktiknya, mekanisme penegakan regulasi masih lebih menitikberatkan pada pembinaan dan pendekatan persuasif, sehingga belum seluruhnya diikuti dengan tindak lanjut yang tegas bagi penerbit atau produsen karya rekam yang tidak melaksanakan kewajiban serah simpan. Akibatnya, masih ditemukan pihak-pihak yang belum menyerahkan karyanya tanpa adanya konsekuensi administratif yang jelas, kondisi ini berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan dan keberlanjutan penghimpunan terbitan lokal apabila tidak disertai dengan penguatan pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten. Namun demikian, secara umum pelaksanaan pengadaan koleksi deposit KCKR di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan berjalan dengan baik dan tidak menemui kendala yang bersifat krusial karena sebagian besar penerbit bersikap kooperatif dan terbuka ketika mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai kewajiban serah simpan.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa kendala utama dalam penghimpunan koleksi deposit adalah lemahnya internalisasi regulasi di tingkat institusi yang disebabkan oleh faktor organisasi dan rotasi pegawai karena aturan

yang ada sering tidak dijalankan secara konsisten. Kurangnya pemahaman dan dukungan dari sumber daya manusia membuat proses penghimpunan koleksi deposit berjalan kurang optimal (Islamiati & Haqqi, 2021).

Upaya Mengatasi Kendala Pengadaan Koleksi KCKR

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengadaan koleksi deposit KCKR, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat melakukan sejumlah upaya, meliputi kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada penerbit, instansi, serta penulis lokal, baik melalui kunjungan langsung, kegiatan formal, maupun media komunikasi, dengan pendekatan yang bersifat persuasif dan dialogis. Pendekatan persuasif dilakukan dengan membangun komunikasi yang baik antara pustakawan dengan penerbit dan pencipta karya, memberikan penjelasan secara bertahap mengenai kewajiban serah simpan KCKR, serta menumbuhkan kesadaran bahwa koleksi deposit bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya pelestarian karya intelektual daerah. Sementara itu, pendekatan dialogis diterapkan melalui ruang diskusi dua arah antara pustakawan dan penerbit, sehingga penerbit dapat menyampaikan kendala maupun pertanyaan terkait proses serah simpan dan solusi dapat dirumuskan bersama sesuai kondisi di lapangan.

Perpustakaan juga memperkuat pendataan penerbit lokal dan meningkatkan koordinasi lintas bidang sebagai langkah strategis untuk memastikan kewajiban serah simpan dapat terlaksana secara lebih tertib dan terarah. Sebagai bentuk inovasi, perpustakaan tengah mengembangkan penerapan aplikasi e-Deposit yang memungkinkan proses penyerahan, pencatatan, serta pemantauan terbitan dilakukan secara digital, sehingga inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan koleksi deposit KCKR. Berbagai upaya tersebut berimplikasi langsung terhadap penguatan pelestarian koleksi deposit KCKR di perpustakaan provinsi. Koleksi KCKR tidak hanya dihimpun secara lebih sistematis, tetapi juga dikelola dan dimanfaatkan dengan memperhatikan keberlanjutan akses informasi dalam jangka panjang. Mengingat sebagian besar koleksi deposit KCKR hanya tersedia dalam satu eksemplar, koleksi tersebut tidak dapat dipinjamkan dan hanya dapat dibaca di tempat sebagai langkah perlindungan terhadap keberadaan fisik koleksi. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi menjaga nilai KCKR sebagai rekam jejak intelektual dan dokumentasi resmi daerah, sekaligus memastikan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya tetap dapat diakses oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, koleksi deposit KCKR berperan penting dalam pelestarian karya lokal Sumatera Barat sebagai instrumen pengadaan dan penghimpunan terbitan lokal. Melalui

mekanisme deposit, terbitan yang dihasilkan oleh penerbit, instansi, dan pencipta karya dapat dihimpun secara sistematis sehingga tidak hilang dari peredaran dan tetap terdokumentasi sebagai bagian dari khazanah pengetahuan daerah.

KESIMPULAN

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat berperan sebagai perpustakaan provinsi yang memiliki kewenangan dalam menghimpun terbitan penerbit lokal melalui pengadaan koleksi deposit Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR). Penghimpunan koleksi deposit dilakukan melalui mekanisme pendataan penerbit, kegiatan hunting KCKR, penyerahan koleksi langsung oleh penerbit, sosialisasi kewajiban serah simpan, serta pendekatan persuasif dan edukatif kepada penerbit, instansi, dan pencipta karya, sehingga proses penghimpunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membangun pemahaman dan kesadaran penerbit terhadap pentingnya deposit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penghimpunan terbitan lokal bukan berasal dari penolakan penerbit, melainkan rendahnya tingkat kesadaran sebagian penerbit instansi terhadap kewajiban serah simpan, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya penerapan sanksi administratif. Untuk mengatasi kendala tersebut, perpustakaan secara berkelanjutan melakukan sosialisasi, memperkuat kerja sama lintas lembaga, serta mengembangkan sistem e-Deposit sebagai inovasi yang mendukung proses pengadaan, pendataan, dan pemantauan koleksi deposit. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan keterhimpunan terbitan lokal sekaligus memperkuat pelestarian koleksi deposit KCKR secara berkelanjutan di tingkat provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, M. (2024). *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar* (1st ed.). Unja Publisher.
- Alfatih, A. (2017). *Pedoman Mudah Melaksanakan Penelitian Deskriptif Kualitatif*.
- Amalia, C. (2025). Pengadaan Koleksi Buku dan Non-Buku Di Perpustakaan Universitas Indonesia (UI) Perpustakaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Perpustakaan Harvard University dan Perpustakaan National University of Singapore (NUS). *IQRA` : Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 19(1), 166–192. <https://doi.org/10.30829/iqra.v19i1.24107>
- Azis, A., Ardiansah, M., Yanto, H., & Odi, M. (2024). Peran Perpustakaan dalam

- Memperkaya Ilmu Pengetahuan Mahasiswa di Perguruan Tinggi. *Jurnal Lentera Pendidikan Pusat Penelitian Lppm Um Metro*, 9(2), 270. <https://doi.org/10.24127/jlpp.v9i2.3859>
- Dalimunthe, N., Purwanti, D., & Adawiyah, A. (2020). Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi OPAC Terhadap Kepuasan Mahasiswa Menggunakan Metode Libqual (Studi Kasus: Perpustakaan Uin Suska Riau). *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.24014/rmsi.v6i2.9506>
- Fahriyah, F. (2020). Implementasi Peraturan Serah Simpan Karya Cetak serta Karya Rekam pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam Upaya Mewujudkan Karya Koleksi Nasional. *Tibannbaru : Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 4(1), 18–29. <https://doi.org/10.30742/tb.v4i1.904>
- Harahap, S. T. A., Sayekti, R., & Ismail. (2024). Manajemen Koleksi Deposit Dinas Perpustakaan dan Arsip Deli Serdang. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, 2(1), 84–88. <https://doi.org/10.33151/ijomss.v2i1.184>
- Hasan, H., Boham, A., & Runtuwene, A. (2019). Manajemen Koleksi Deposit di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tidore Kepulauan. *Acta Diurna Komunikasi*, 1(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/25078>
- Islamiati, A. A. N., & Haqqi, A. (2021). Pelestarian Khazanah Terbitan Daerah Melalui Layanan Deposit: Implementasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018. *Baitul 'Ulum: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 5(2), 1–14. <https://doi.org/10.30631/baitululum.v5i2.122>
- Kurniati, K. (2023). Peran Perpustakaan Dalam Melestarikan Warisan Budaya dan Sejarah Lokal. *THE LIGHT: Journal of Librarianship and Information Science*, 3(2), 102–114. <https://doi.org/10.20414/light.v3i2.8783>
- Kusnandar, Cms, S., & Rukmana, E. N. (2025). Menjaga Memori, Merawat Budaya, Menuju Sdgs: Peran Transformasional Perpustakaan Di Era Modern: Peran Transformasional Perpustakaan di Era Modern. *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora*, 7(1), 42–47. <https://doi.org/10.61296/jkbh.v7i1.297>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3/E. SAGE Publications. <https://repositori.telkomuniversity.ac.id/pustaka/149484/qualitative-data-analysis-a-methods-sourcebook-3-e-.html>
- Ratnaningrum, E. N. I., & Prasetyawan, Y. Y. (2018). Ketersediaan Koleksi Local Content

- sebagai Upaya Pelestarian Budaya Daerah di Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(4), 71–80. <https://doi.org/10.14710/jip.v7i4.71-80>
- Saputra, A. S., Gunaidi, A., & Samosir, F. T. (2023). Management of Local Content Collections as an Effort to Preserve Regional Culture at Public Library. *Record and Library Journal*, 9(1), 66–76. <https://doi.org/10.20473/rlj.V9-I1.2023.66-76>
- Sentiana, F., Zulaikha, S. R., Iqbal, R., Mustofa, M. B., & Zahro, F. M. (2025). Collection Development Strategies in Libraries. *Jurnal El-Pustaka*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.24042/6tmgr603>
- Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, Pub. L. No. 13, 13 13 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/99857/uu-no-13-tahun-2018>
- Winanda, K., & Ardoni. (2025). Penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. *EDU RESEARCH*, 6(3), 2117–2124. <https://doi.org/10.47827/jer.v6i3.1429>